

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA



20
24

**Sekretariat DPRD
Kab. Kutai Kartanegara**



TAHUN ANGGARAN 2023

Jl. Robert Wolter Mongisidi,
Timbau, Kec. Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur 75511



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Homepage : <http://www.dprdkutaikartanegara.go.id>

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 1 Tenggarong , 75511 Telp; (0541) – 661095 (Operator)

Fax : (0541) 661699E-mail : setwan@dprdkutaikartanegara.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : P-1236 / SET.DPRD / KEU.I / 900.1.1.2 / 8 / 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2024 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : B-645 / BAPP / 065.11 / 073/ 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024, tanggal 14 Maret 2023;
 2. Bahwa dalam upaya mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu sebagaimana tujuan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud;
 3. Bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu diatur dalam Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94);
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : B-645 / BAPP / 065.11 / 073/ 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024, tanggal 14 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Komposisi Personalia sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. H. M. Ridha Darmawan , SP.,MP | Pengarah |
| 2. Awang Agus D, SE.,M.Si | Penanggung Jawab |
| 3. H. Dedy Mulyadi, SE.,M.Si | Penanggung Jawab |
| 4. Akhmad Supriyadi, S.Sos.,MM | Penanggung Jawab |
| 5. Nurhayati Touristiany, S.Sos | Penanggung Jawab |
| 6. Faruq Rahman, S.Sos | Ketua |
| 7. Hj. Fitriani, SE | Sekretaris |
| 8. Muhammad Daleq, SE | Anggota |
| 9. Dewi Sasmita, S.Sos., MM | Anggota |
| 10. Noor intan, S.Sos.,M.Si | Anggota |
| 11. Hj. Siti Masyitah, S.Sos | Anggota |

12. H. Akhmad, SE. MM	Anggota
13. Dwi Oktiviawaty, S.Sos.,M.Si	Anggota
14. Sitti Maimanah, S.Sos.,M.Si	Anggota
15. Atylla Maisyarah, S.Sos	Anggota
16. Hj. Evva Handayanie, SH	Anggota
17. Lita Rosaria Febryanti, S.Pi,MM	Anggota

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat DPRD sebagai mana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan, Menghimpun dan Menganalisis Rencana Kegiatan Urusan Bagian / Sub Bagiannya masing-masing;
 2. Berkoordinasi dengan Instansi terkait Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
 3. Mengevaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
 4. Merumuskan bersama-sama Kegiatan Prioritas Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
 5. Melaksanakan Penyempurnaan Rencana Kerja atas hasil penelaahan, koreksi dan masukkan - masukkan dari DPRD dan Bagian / Sub Bagian masing - masing.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA


H. M. RIDHA DARMAWAN, SP.,MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701117 199803 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan KaruniaNya sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor : B-645/BAPP/065.11/03/2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024.

Rancangan Akhir Renja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam rangka memberikan gambaran mengenai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan visi, misi dan pencapaian sasaran serta tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Renja ini adalah evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atau acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD selama Tahun 2024 dan kiranya dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi, optimalisasi peningkatan kinerja maupun evaluasi kinerja.

Selanjutnya disadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024, disampaikan terima kasih.

Tenggarong, Agustus 2023

**Sekretaris,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

H.M. Ridha Darmawan, SP., MP.
Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian RenstraPerangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB. II TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHI	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD	54
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAKT DAERAH.....	55
4.1. Program dan Kegiatan	55
BAB. V PENUTUP.....	73
5.1 Catatan Penting	73
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	73
5.3 Rencana Tindak Lanjut	75

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang selanjutnya akan disebut Renja. Undang – undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencanan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Akhir Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan dan Rancangan awal RKPD.

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat Rancangan Akhir kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintah dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik dan lembaga informal masyarakat karena pada intinya negara demokratis menyebutkan bahwa demokrasi pada arus lokal cukup memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan demokrasi pada tingkat nasional Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antar sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada pelaksanaan pembangunan RPJMD 2016-2021.

Rencana Kerja OPD merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah, yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. dalam 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai langkah , kegiatan melalui penetapan indikator kinerja Rencana Kerja OPD merupakan salah satu evaluasi pelaksanaan

program kegiatan Instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan. Penyusunan Renja juga untuk menerjemahkan Rentra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ialah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahun anggaran 2024 yang meliputi gambaran program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target kinerjanya yang akan dicapai pada tahun 2024
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan
4. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap tugas dan fungsi

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja PD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahani dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi Perangkat

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2/2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024), mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan Realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan realisasi APBD untuk Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara. Pokok-pokok materi yang disajikan bab ini :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan;
5. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan

6. Kebijakan atau tidaknya perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang akan tersaji adalah Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan subbab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing – masing, dengan format tabel T-C.30.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraantugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
5. Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang Strategis dalam program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Melampirkan tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota dan musrembang kecamatan.

Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Tabel T-C.32 mengenai usulan program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PROGRAM KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD, baik jenis program /Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel T-C.33 rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan Membahas Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya dan capaian indikator kinerja penilaian pencapaian target
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana kerja suatu OPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis OPD tersebut. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja adalah suatu gambaran yang disampaikan melalui hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja tercapainya evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu maksud yaitu (tahun n-2/2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024) yang mengacu pada APBD tahun berjalan (2023) berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan kepada hasil input dan output Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pencapaian target Renstra, berdasarkan hasil rencana kerja OPD tahun 2021 dengan review hasil pelaksanaan Renja OPD tahun 2021 dan realisasi Renstra OPD 2021-2026 yang dicapai dengan evaluasi yang mengacu pada realisasi APBD.

Realisasi dan rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra akan disajikan dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD S/d Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara
Sekretariat DPRD

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	1	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		85 (A)	73,34 (BB)	77 (BB) Nilai	72,56 (BB)	100%	79 (BB)		100%
4	2	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60	12	12	12	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 2 1 2 1 4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 2 1 2 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
4 2 1 2 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
4 2 1 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						30	6	6	6	100%	100%	100%	100%
4 2 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.680	2,152 orang/bulan	2136 Orang/bulan	2,152 orang/bulan	100%	2136 Orang/bulan	2136 Orang/bulan	100%
4 2 1 2 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4 2 1 2 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 2 1 2 2 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
											Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Keuangan Akhir Tahun SKPD								
4	2	1	2	2	6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	6 Kali	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	2	1	2	2	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	90	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
4	2	1	2	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5	1	1	1	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	3	1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	1	2	3	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	2	1	2	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20	4	4	4	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	5	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.555		311 Paket	311 Paket	100%	311 Paket	311 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 2 1 2 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
4 2 1 2 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85	0 Orang	17 orang		0%	17 Orang	17 Orang	100%
4 2 1 2 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100		20 Orang	54 orang	318%	20 Orang	20 Orang	100%
4 2 1 2 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah						30	6	6	6	100%	100%	100%	100%
4 2 1 2 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	100%			
4 2 1 2 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.140	3704 Jenis	4028 Buah	4028 paket	100%	4028 Paket	4028 Paket	100%
4 2 1 2 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47.520	9504 Porsi	9504 Porsi	9504 paket	100%	9504 Paket	9504 Paket	100%
4 2 1 2 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15.900	155 Lembar	3180 Lembar	3180 paket	100%	3180 Paket	3180 Paket	100%
4 2 1 2 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	191.760	38352 eksemplar	38352 Eksemplar	76,904 Dokumen	200%	38352 Dokumen	38352 Dokumen	100%

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
											Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Disediakan								
4	2	1	2	6	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1.090	210 Orang/Kali	218 Orang/Hari	186 laporan	85%	218 Laporan	218 Laporan	100%
4	2	1	2	6	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35	2 Kegiatan	7 Berkas	12 Dokumen	171%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
4	2	1	2	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.945	1.389	1.389	1.389	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	7	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau laangan				6 Unit	100%			
4	2	1	2	7	5		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				6 Unit	100%			
4	2	1	2	7	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.540	308 Unit	308 Jenis	308 unit	100%	308 Unit	308 Unit	100%
4	2	1	2	7	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.405	193 Unit	1081 Unit	1081 Unit	100%	1081 Unit	1081 Unit	100%
4	2	1	2	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60	12	12	12	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	8	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	1400 Laporan	12 Bulan	70 laporan	583%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
1						2	3	4	5	Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)	9	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
4	2	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12 Bulan	12 Bulan	12 laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	60	12 Bulan	12 Bulan	12 laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.920	793	793	793	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	235	56 Unit	47 Unit	47 Unit	100%	47 Unit	47 Unit	100%
4	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	235	105 Unit	47 Unit	47 Unit	100%	47 Unit	47 Unit	100%
4	2	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50 750	89 kali	10 Unit 144 Kali	144 unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
4	2	1	2	9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	750 1200	115 Kali/Unit	150 Unit 240 Kali	240 unit	100%	150 Unit	150 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Lainnya	Dipelihara/ Direhabilitasi							
4	2	1	2	1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10	2	2	2	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	1	5	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	2.700	12 Bulan	540 Orang/Unit	526 Orang/Unit	97%	540 Orang/bulan	540 Orang/bulan	100%
4	2	1	2	1	5	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.600	140 stel	520 stell	520 paket	100%	520 Stel	520 Stel	100%
	2	1	2	1	5	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	225		45 orang	0 orang	0%	45 Orang	45 Orang	100%
4	2	1	2	1	6	Layanan Administrasi DPRD	15	3	3	3	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	1	6	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5		1 Kegiatan	3 Dokumen	300%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	1	2	1	6	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.745	228 Rapat	349 Rapat	349 Laporan	100%	349 Laporan	349 Laporan	100%
4	2	1	2	1	6	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	20	4 Rumah Tangga	4 Rumah Tangga	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
4	2	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	80	25	25	25	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan						Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
							Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4 2 2 2 1 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50	10 Rapat	10 Rapat	11 Dokumen	110%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%		
4 2 2 2 1 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	120	19 Raperda	24 Raperda	9 Dokumen	38%	24 Dokumen	24 Dokumen	100%		
4 2 2 2 1 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	120	1 Raperda	24 Raperda	4 Dokumen	17%	24 Dokumen	24 Dokumen	100%		
4 2 2 2 1 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	40	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%		
4 2 2 2 1 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%					
4 2 2 2 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		90	8	18	8	100%	100%	100%	100%		
4 2 2 2 2 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	25	2 Dokumen	5 Rapat	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		
4 2 2 2 2 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25		5 Rapat	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		
4 2 2 2 2 3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	10	4 Dokumen	2 Rapat	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		
4 2 2 2 2 4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	10		2 Rapat	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	2	2	2	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	10		2 Rapat	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	2	2	2	2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10		2 Rapat	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	2	2	2	3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		950	254	254	254	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	180	36 Layanan	3 Laporan	3 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%
4	2	2	2	3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	180	33 Layanan	3 Laporan	3 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%
4	2	2	2	3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	180	36 Layanan	3 Laporan	3 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%
4	2	2	2	3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	180	36 Layanan	3 Laporan	3 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%
4	2	2	2	3	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	180	36 Layanan	3 Laporan	3 Dokumen	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
										Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	2	2	3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	2	2	2	3	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	20		3 Dokumen	0 Dokumen	0%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	2	2	2	3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	2	2	2	4		Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	4	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45			0	0%			
4	2	2	2	4	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	225	3 kegiatan	45 Dokumen	45 Dokumen	100%	45 Dokumen	45 Dokumen	100%
4	2	2	2	4	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	75	29 Media	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
4	2	2	2	4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	600	46 orang	120 orang	120 orang	100%	120 Orang	120 Orang	100%
4	2	2	2	4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	35	84 orang	84 orang	84 orang	100%	7 Orang	7 Orang	100%
4	2	2	2	4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masvarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penvelenggaraan Hubungan	5	1 kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
											Target Renja - PD tahun (2022)	Realisasi Renja - PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Masyarakat								
4	2	2	2	4	7		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4	2	2	2	5			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	5	2		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
4	2	2	2	5	3		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15	3 Kegiatan	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
4	2	2	2	6			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	6	1		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	5		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	6	2		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	50	36 Layanan	3 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%	
4	2	2	2	8			Fasilitasi Tugas DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	8	1		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	480	2052 orang/ kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	96 Dokumen	96 Dokumen	100%
4	2	2	2	8	3		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	70		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
4	2	2	2	8	4		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	480	792 orang/ kegiatan	96 Dokumen	96 Dokumen	100%	96 Dokumen	96 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektivitas kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai tujuan, visi dan misi daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Mengingat Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengorganisasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Maka ditentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan berdasarkan target capaian pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara

N O	Indikator *)	SPM / Stand ar Nasio nal	IK K	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tah un	Tah un	Tah un	Tah un	Tah un	Tah un	Tah un	Tah un	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Fasilitas kegiatan DPRD			70 (B)	70 (B)	73 (B)	73 (B)	70,65 (B)		73 (B)	73 (B)	memenuhi target
2	Persentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	memenuhi target
3	Nilai SAKIP			77 (BB)	79 (BB)	81 (A)	83 (A)	72,56 (BB)		81 (A)	83 (A)	tidak memenuhi target
4	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			12	12	12	12	12		12	12	memenuhi target

	Kinerja Perangkat Daerah											
5	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			6	6	6	6	6		6	6	memenuhi target
6	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			1	1	1	1	2		2	2	memenuhi target
7	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			4	4	4	4	4		4	4	memenuhi target
8	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			6	6	6	6	6		6	6	memenuhi target
9	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1389	1389	1389	1389	1389		1389	1389	memenuhi target
10	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12		12	12	memenuhi target
11	Jumlah Barang Milik Daerah			254	254	254	254	793		793	793	memenuhi target
				384	384	384	384					memenuhi target
12	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			2	2	2	2	2		2	2	tidak memenuhi target
13	Jumlah layanan Administrasi DPRD			3	3	3	3	3		3	3	memenuhi target
14	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Rapat-Rapat			100 %	100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	memenuhi target

	Kerja DPRD											
15	Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD			100 %	100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	memenuhi target
16	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat			16	16	16	16	11		16	16	tidak memenuhi target
17	Jumlah Rapat Pembahasan			18	18	18	18	18		18	18	memenuhi target
18	Jumlah Pengawasan DPRD			190	190	190	190	18		21	21	tidak memenuhi target
19	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	memenuhi target
20	Persentase Kegiatan yang terlaksana			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	memenuhi target
21	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	memenuhi target
22	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	memenuhi target

Berdasarkan tabel diatas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD secara umum telah terlaksana dengan baik dan telah memenuhi target. Namun ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target dapat diuraikan sebagai berikut :

- Indikator Nilai Sakip dengan target Renstra PD Tahun 2022 ialah 77 (B)/Sangat Baik dan dengan realisasi Tahun 2022 ialah 72,56 (BB)/Sangat baik disebabkan oleh pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi Akip tahun sebelumnya yang belum maksimal dan belum lengkapnya dokumen pendukung atas pelaksanaan evaluasi Akip Internal.
- Pada Indikator jumlah keuangan dan layanan Sekretariat DPRD tidak mencapai target dikarenakan sub kegiatan pelaksanaan *medical check up* tidak dapat telaksana karena terkendala regulasi serta salah dalam penyusunan

alokasi

- c. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat tidak mencapai target Renstra Tahun 2022 dipengaruhi oleh faktor waktu serta lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan yang tidak sesuai dengan rencana, penerima manfaat bertambah/berkurang, dan Pelaksanaan kegiatan terkendala regulasi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategis dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, perlu dilakukan identifikasi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan. Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi beberapa permasalahan serius yang harus segera diatasi guna dapat menyelesaikan dengan perubahan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, yang demikian cepat. Permasalahan-permasalahan pembangunan akan diuraikan untuk mengetahui factor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD yaitu :

- a. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - b. Belum optimalnya kualitas fasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD
- Misi kepala daerah yang melekat pada sekretariat DPRD yaitu {Adapun berdasarkan permasalahan yang dihadapi dampaknya terhadap pencapaian
- a. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
 - b. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusidan nepotisme.

Dukungan segenap Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Guna mendukung pelaksanaan tugas Legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD. Berikut merupakan Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;

- a. Tantangan (Threats) :
 - 1. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
 - 2. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan
- b. Peluang (Opportunities) :
 - 1. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DPRD
 - 2. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan public kedepan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Akhir renja menjabarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD yang akan diselaraskan dengan RENSTRA dan diturunkan dalam perencanaan tahunan dalam RENJA OPD, kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui didalam pelaksanaan APBD tahun 2022. Beberapa usulan yang diajukan didalam Rancangan Akhir Renja tidak sama dengan alokasi rencana yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir RKPD yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dikarenakan adanya beberapa perubahan-perubahan dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adapun karena tupoksi tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Dewan baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 guna mendukung target dan capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kab. Kutai Kartanegara		79 (BB)	74.751.059.139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kab. Kutai Kartanegara		79 (BB)	77.026.147.227	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		12	1.650.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		12	1.650.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	250.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	250.000.000	

		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	250.000.000	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	200.000.000	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	250.000.000	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	200.000.000	

		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	250.000.000	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	250.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	250.000.000	
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		6	20.676.470.758	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		6	19.235.985.389	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.136	19.419.724.758	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.366	17.979.239.389	Penyesuaian jumlah ASN
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	117.240.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	117.240.000	

		1 0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	108.953.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	108.953.000	
		1 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	45.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	45.500.000	
		1 2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	126.425.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	126.425.000	

		1 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18	858.628.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18	858.628.000	
	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		1	418.250.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		1	418.250.000	
		1 4	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	1	164.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	1	164.000.000	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi pada Sekretariat DPRD di pasal 12 ayat e dan f, tata kerja kelompok jabatan fungsional

													perencana yang mana menjadi tupoksi dari Perencana
		15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	254.250.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	254.250.000	
	4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		4	1.436.065.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		4	1.186.065.000	
		16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	311	500.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	311	400.000.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

		1 7					Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	7	100.000.000	1. Absensi 2. DUK 3. KENPA 4. KGB 5. Satya Lencana 6. LHKASN 7. LHKPN
		1 8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	336.065.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	336.065.000	
		1 9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17	250.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17	0	menggeser pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
		2 0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	350.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	350.000.000	

	5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		6	2.758.211.994	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara		6	2.958.211.994	
		21						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	200.000.000	untuk pemeliharaan kegiatan jaringan listrik pada Sekretariat DPRD
		22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.028	715.965.994	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.028	715.965.994	
		23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9.504	1.010.422.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9.504	1.010.422.000	
		24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.180	415.924.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.180	415.924.000	
		25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	38.352	160.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	38.352	160.900.000	

		26	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218	318.500.000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218	318.500.000	
		27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	136.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	136.500.000	
		28						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0		
6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kab. Kutai Kartane gara		1.389	1.500.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kab. Kutai Kartane gara		1.389	1.500.000.000	
		29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	308	700.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	308	700.000.000	

		30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.081	800.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.081	800.000.000	
	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara		12	8.453.870.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara		12	8.253.870.000	
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.870.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.870.000	
		32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.300.000.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.950.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.950.000.000	

	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara		254	1.802.553.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara		254	1.802.553.000	
	34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47	311.048.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47	311.048.000	
	35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	311.505.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	311.505.000	
	36	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	800.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	800.000.000	

		37	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	150	380.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	150	380.000.000	
9			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	kab. Kutai Kartan egara		2	31.802.468. 387	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	kab. Kutai Kartan egara		2	35.768.041. 844	
		38	Penyelenggara an Administrasi Keuangan DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	540	31.402.018. 387	Penyelenggara an Administrasi Keuangan DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	540	35.367.591. 844	
		39	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	520	320.450.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	520	320.450.000	
		40	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up DPRD</i>	45	80.000.000	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up DPRD</i>	45	80.000.000	
10			Layanan Administrasi DPRD	kab. Kutai Kartan egara		3	4.253.170.0 00	Layanan Administrasi DPRD	kab. Kutai Kartan egara		3	4.253.170.0 00	

		4	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	136.500.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	136.500.000	
		4	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	349	2.973.570.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	349	2.973.570.000	
		4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	1.143.100.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	1.143.100.000	
I	I		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	30.676.810.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	30.926.810.000	
	1	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	kab. Kutai Kartanegara		16	5.411.700.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	kab. Kutai Kartanegara		16	5.511.700.000	
		4	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	268.750.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	518.750.000	Pagu dari sub kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang - undangan

		4 5	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	24	3.823.500.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	24	3.823.500.000	
		4 6	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6	381.650.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6	231.650.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
		4 7	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	937.800.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	937.800.000	
		4 8	Penyusunan Tata Tertib DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0	Penyusunan Tata Tertib DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0	
1 2			Pembahasan Kebijakan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara		18	1.050.000.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara		18	1.050.000.000	

		4 9	Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	375.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	375.000.000	mengubah target capaian kinerja
		5 0	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	375.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	375.000.000	mengubah target capaian kinerja
		5 1	Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2	100.000.000	Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	100.000.000	mengubah target capaian kinerja
		5 2	Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2	100.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	100.000.000	mengubah target capaian kinerja
		5 3	Pembahasan Laporan Semester	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	50.000.000	Pembahasan Laporan Semester	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	50.000.000	mengubah target capaian kinerja
		5 4	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	50.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	50.000.000	mengubah target capaian kinerja

1	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	kab. Kutai Kartanegara		190	4.158.500.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	kab. Kutai Kartanegara		190	3.658.500.000	
	55	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
	56	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
	57	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
	58	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah

		59	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	36	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		60	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	200.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	200.000.000	Pagu 164.000.000 digeser ke sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		61	Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	364.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	364.000.000	
		62	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	182.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	182.000.000	
14			Peningkatan Kapasitas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	5.391.260.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	5.541.260.000	

		6 3	Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0		Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0		
		6 4	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	45	1.274.750.0 00	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	45	1.274.750.0 00	
		6 5	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15	1.974.210.0 00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15	2.124.210.0 00	adanya JDIHN yang harus dilengkapi dengan informasi tambahan melalui aplikasi JDIH Daerah
		6 6	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120	1.505.300.0 00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120	1.505.300.0 00	
		6 7	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	295.750.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	295.750.000	
		6 8	Penyelenggara an Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	182.000.000	Penyelenggara an Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	182.000.000	

		6 9	Penyusunan Program Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	159.250.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	159.250.000	
1 5			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara		100 %	3.683.660.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara		100 %	4.083.660.000	
		7 0						Kunjungan Kerja Dalam Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3	500.000.000	kundupil dan koordinasi (undangan)
		7 1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	129.485.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	129.485.000	
		7 2	Pelaksanaan Reses	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3.554.175.000	Pelaksanaan Reses	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3.454.175.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
1 6			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	333.790.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	333.790.000	
		7 3	Penyusunan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	136.500.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	136.500.000	

		7 4	Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	10	197.290.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	10	197.290.000	
	1 7							Pembahasan Kerja Sama Daerah	kab. Kutai Kartanegara		100 %	100.000.000	
		7 5						Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	100.000.000	untuk mendukung kerja sama DPRD dengan instansi vertikal
	1 8		Fasilitasi Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	10.647.900.000	Fasilitasi Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	10.647.900.000	
		7 6	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	96	7.694.800.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	96	7.594.800.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD
		7 7						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	100.000.000	untuk menghimpun dokumen laporan hasil kinerja AKD selama 3 (tiga) masa sidang

		7 8	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14	182.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14	182.000.000	
		7 9	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96	2.771.100.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96	2.771.100.000	
			TOTAL				105.427.869.139	TOTAL				107.952.957.227	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil dari musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Tenggarong untuk Tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan Program dan Kepentingan dari Para Pemangku kepentingan yang dituju kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Table T C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

N o	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Jalan perubahan menuju Indonesia Hebat adalah jalan ideologis. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan kami akan dipandu oleh VISI sebagai berikut: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG Upaya untuk mewujudkan Visi terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong itu akan ditempuh melalui MISI

sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara dalam upaya mendukung terwujudnya Visi - Misi Nasional Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara meningkatkan pelayanan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Kabupaten Kutai kartanegara sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka Penyusunan RPJMD 2021-2026, menyampaikan visi-misi ke RPJMD,” Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara, Visi

‘Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia’

Sejahtera adalah Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

Berbahagia adalah Kondisi masyarakat Kukar yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Es

Misi ;

1. Memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efesien dan melayani.

2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah
5. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya ALam yang Berwawasan Lingkungan.

Dengan mengacu kepada visi – Misi RPJMD 2021 – 2026 dengan harapan semua kepala OPD dapat menterjemahkan visi-misi dan program dedikasi ke dalam strategy arah kebijakan dan program prioritas perangkat daerah, serta melibatkan para akademisi dan data-data yang valid dan aktual dan disampaikan secara sistematis dan dilaporkan secara berjenjang.

Visi dan Misi RPJMD yang melekat pada Sekretariat DPRD Merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola untuk mencapai tujuan, bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan serta mengatasi kesenjangan yang terjadi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Visi Sebagai Berikut “ Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan “ Visi tersebut dimaksud adanya upaya maksimal dari seluruh aparatur untuk lebih profesional didalam pelaksanaan tugas pelayanan dan kelancaran sehingga mampu menjadi institusi yang professional dan berkualitas, sehingga dapat diwujudkan untuk meningkatkan kualitas Birokrasi professional untuk menuju *good governance* dengan Misi sebagai berikut;

- i. Meningkatkan Kualitas Suber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan perkembangan organisasi.
- ii. Meningkatkan tertib administrasi kesekretariatan yang akuntabel dan transparan.
- iii. Meningkatkan fasilitasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dan sasaran adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasi. Tujuan (goals) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasi. Tujuan (goals) adalah pernyataan umum tentang “ke arah mana” suatu organisasi akan berada di masa depan, merupakan penjabaran Misi, Sesuatu (what) yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus; meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur.

Sasaran (Objectives) bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur). Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terkunci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang bersifat spesifik dan terukur dari tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula. Sehingga dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya acuan sebagai tolak ukur untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai strategis;

Tujuan : Mewujudkan kualitas fasilitas terhadap Agenda Kegiatan DPRD

Sasaran : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu : *Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia*’.

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2024 menguraikan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam tahun anggaran 2024 dalam perumusan program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra. Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan Rancangan Akhir Renja, untuk menyikapi hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas.

3. Menyesuaikan Dengan Berita Acara Kesepakatan Review Program RPJMD

Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut:

- a. Prosentase Penyelenggara Rapat-Rapat yang Sesuai dengan Jadwal
- b. Jumlah Peraturan Perundangan-undangan yang disahkan
- c. Persentase Anggota DPRD yang puas atas layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka diperlukan penyesuaian kegiatan dan pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2024 dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2024 . Adapun jumlah kegiatan pada tahun 2024 terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 program, 10 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 1 program, 8 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 2 program, 18 Kegiatan dan 79 Sub Kegiatan

Adapun perincian Kegiatan Tahun 2024 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		kab. Kutai Kartaneg ara	79 (BB)	77.026.147.22 7	Dana Transfe r Umum - Dana Bagi Hasil		79 (BB)	74.501.059.139
4	2	1	2	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartaneg ara	12	1.650.000.000	Dana Transfe r Umum - Dana Bagi Hasil		12	1.650.000.000
4	2	1	2	1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanega ra	3	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	250.000.000
4	2	1	2	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanega ra	2	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	250.000.000

4	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	200.000.000
4	2	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	2	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	250.000.000
4	2	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	200.000.000
4	2	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartanegara	5	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	250.000.000
4	2	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	2	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	250.000.000

4	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanega ra	6	19.235.985.38 9	Dana Transfe r Umum - Dana Bagi Hasil		6	20.676.470.758
4	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanega ra	2.143	17.979.239.38 9	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penambahan ASN sebanyak 7 orang	2.143	19.419.724.758
4	2	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kutai Kartanega ra	2	117.240.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	117.240.000
4	2	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartanega ra	12	108.953.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	108.953.000
4	2	1	2	2	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartanega ra	1	45.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	45.500.000
4	2	1	2	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	kab. Kutai Kartanega ra	2	126.425.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	126.425.000

4	2	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	kab. Kutai Kartanegara	18	858.628.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	18	858.628.000
4	2	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara	1	418.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	418.250.000
4	2	1	2	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	164.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	164.000.000

4	2	1	2	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	254.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	254.250.000
4	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara	4	1.186.065.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4	1.186.065.000
4	2	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	kab. Kutai Kartanegara	311	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	400.000.000
4	2	1	2	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	kab. Kutai Kartanegara	8	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Absensi 2. DUK 3. KENPA 4. KGB 5. Satya Lencana 7.LHKASN 8. LHKASN	100.000.000
4	2	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	kab. Kutai Kartanegara	50	336.065.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		336.065.000
4	2	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	17		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0

4	2	1	2	5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	20	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	20	350.000.000
4	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara	6	2.958.211.994	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6	2.958.211.994
4	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	200.000.000
4	2	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	4.028	715.965.994	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4.028	715.965.994
4	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	9.504	1.010.422.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	9.504	1.010.422.000
4	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	3.180	415.924.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3.180	415.924.000
4	2	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	38.352	160.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	38.352	160.900.000

4	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartanegara	218	318.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	218	318.500.000
4	2	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	7	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	7	136.500.000
4	2	1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	150		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	150	0
4	2	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		kab. Kutai Kartanegara	1.389	1.500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1.389	1.500.000.000
4	2	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	308	700.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	308	700.000.000
4	2	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1.081	800.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1.081	800.000.000
4	2	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		kab. Kutai Kartanegara	12	8.253.870.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12	8.253.870.000

4	2	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kutai Kartanegara	12	3.870.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	3.870.000
4	2	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	12	2.300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	2.300.000.000
4	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	12	5.950.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	5.950.000.000
4	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		kab. Kutai Kartanegara	254	1.802.553.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		254	1.802.553.000
4	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kab. Kutai Kartanegara	47	311.048.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		47	311.048.000
4	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kab. Kutai Kartanegara	47	311.505.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		47	311.505.000

4	2	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab. Kutai Kartanegara	10	800.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	10	800.000.000
4	2	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab. Kutai Kartanegara	150	380.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	150	380.000.000
4	2	1	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		kab. Kutai Kartanegara	2	35.768.041.844	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	31.802.468.387
4	2	1	2	15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	540	35.367.591.844	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	540	31.402.018.387
4	2	1	2	15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	kab. Kutai Kartanegara	520	320.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	520	320.450.000
4	2	1	2	15	3	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	kab. Kutai Kartanegara	45	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	45	80.000.000
4	2	1	2	16		Layanan Administrasi DPRD		kab. Kutai Kartanegara	3	4.253.170.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3	4.253.170.000

4	2	1	2	1	6	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	136.500.000
4	2	1	2	1	6	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	349	2.973.570.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	349	2.973.570.000
4	2	1	2	1	6	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	4	1.143.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4	1.143.100.000
4	2	2	2				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		kab. Kutai Kartanegara	100%	30.926.810.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	30.926.810.000
4	2	2	2	1			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		kab. Kutai Kartanegara	16	5.511.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	16	5.661.700.000
4	2	2	2	1		1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	10	518.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	10	518.750.000
4	2	2	2	1		2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	24	3.823.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	24	3.823.500.000

4	2	2	2	1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	6	231.650.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6	381.650.000
4	2	2	2	1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	kab. Kutai Kartanegara	8	937.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		8	937.800.000
4	2	2	2	1	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0
4	2	2	2	2		Pembahasan Kebijakan Anggaran		kab. Kutai Kartanegara	18	1.050.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		18	1.050.000.000
4	2	2	2	2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	1	375.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	375.000.000
4	2	2	2	2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	1	375.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	375.000.000
4	2	2	2	2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	100.000.000

											Hasil			
4	2	2	2	2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	100.000.000
4	2	2	2	2	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	kab. Kutai Kartanegara	1	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	50.000.000
4	2	2	2	2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	1	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	50.000.000
4	2	2	2	3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		kab. Kutai Kartanegara	190	3.658.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		190	3.658.500.000
4	2	2	2	3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	36	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	36	582.500.000
4	2	2	2	3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	36	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	36	582.500.000
4	2	2	2	3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	kab. Kutai Kartanegara	36	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana	menggeser pagu untuk sub kegiatan	36	582.500.000

							Kesejahteraan Rakyat				Bagi Hasil	kunjungan kerja dalam daerah		
4	2	2	2	3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	36	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	36	582.500.000
4	2	2	2	3	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	kab. Kutai Kartanegara	36	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	36	582.500.000
4	2	2	2	3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartanegara	4	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pagu 164.000.000 digeser ke sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	200.000.000
4	2	2	2	3	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	4	364.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4	364.000.000
4	2	2	2	3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartanegara	2	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	182.000.000
4	2	2	2	4		Peningkatan Kapasitas DPRD		kab. Kutai Kartanegara	100%	5.541.260.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	5.541.260.000

4	2	2	2	4	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0	0
4	2	2	2	4	2	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	45	1.274.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	45	1.274.750.000
4	2	2	2	4	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartanegara	15	2.124.210.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	15	2.124.210.000
4	2	2	2	4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kab. Kutai Kartanegara	120	1.505.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	120	1.505.300.000
4	2	2	2	4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartanegara	7	295.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	7	295.750.000
4	2	2	2	4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	1	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	182.000.000
4	2	2	2	4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	159.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	159.250.000

4	2	2	2	5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		kab. Kutai Kartanegara	100%	4.083.660.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	4.083.660.000
4	2	2	2	5	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3%	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk kumdapil dan koordinasi (undangan)	3%	500.000.000
4	2	2	2	5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	kab. Kutai Kartanegara	2	129.485.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	129.485.000
4	2	2	2	5	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	kab. Kutai Kartanegara	3	3.454.175.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	3	3.454.175.000
4	2	2	2	6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		kab. Kutai Kartanegara	100%	333.790.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	333.790.000
4	2	2	2	6	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	136.500.000
4	2	2	2	6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	10	197.290.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10	197.290.000

4	2	2	2	7		Pembahasan Kerja Sama Daerah		kab. Kutai Kartanegara	100%	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	100.000.000
4	2	2	2	7	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk mendukung kerja sama DPRD dengan instansi vertikal	1	100.000.000
4	2	2	2	8		Fasilitasi Tugas DPRD		kab. Kutai Kartanegara	100%	10.647.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	10.647.900.000
4	2	2	2	8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	96	7.594.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD	96	7.594.800.000
4	2	2	2	8	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk menghimpun dokumen laporan hasil kinerja AKD selama 3 (tiga) masa sidang	3	100.000.000
4	2	2	2	8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartanegara	14	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		14	182.000.000
4	2	2	2	8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	96	2.771.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		96	2.771.100.000
						TOTAL				107.952.957.227				105.427.869.139

BAB. V

P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi SKPD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RENJA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan. RENJA berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi

kedepan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*),

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kaidah-kaidah pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 :

1. Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara agar melaksanakan program – program dalam RENJA ini dengan sebaik – baiknya secara konsisten, tertib dan terpadu melalui Kerjasama dan koordinasi antar bagian maupun pihak – pihak terkait
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan pasal 273 ayat (2) dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD untuk dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renja sebagai bahan penyusunan RKPD
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap Renstra dan RENJA OPD
4. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan RENJA didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 menetapkan 2 program, 18 Kegiatan dan 79 Sub Kegiatan. Rencana tindak lanjut dari program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) dalam rangka menuju pemeritahan yang bersih;
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan target – target sub kegiatan yang ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala;

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun Kedepan. Adapun pelaksanaan program dalam Dokumen RENJA ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait serta kritik yang membangun guna tercapainya sasaran dan keberhasilan terhadap program yang direncanakan.

Tenggarong, Agustus 2023

Sekretaris,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara


H.M. Ridha Darmawan, SP., MP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008